



Pengembangan Ekosistem Inovasi Desa melalui Penguatan Kelembagaan Lokal: Model Tata Kelola Kolaboratif untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Ahmad ^{1*}, Ambo Asse ², Jamaluddin Ahmad ³, M.Rais Razak ⁴, Nurjannah Nonci ⁵,
Muliani ⁶, Andi Astinah ⁷, Ahmad Mustanir ⁸

¹⁻⁸ Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

*Penulis Korespondensi : ahmad@pps.umsrappang.ac.id

Abstract. Sustainable village development requires an approach that is not only oriented toward physical development but also toward strengthening institutional capacity and developing an innovation ecosystem capable of promoting village independence. Sidenreng Rappang Regency has significant agricultural, social, and economic resource potential that can be developed through locally based innovation. However, various challenges, such as weak village institutional capacity, low collaboration among actors, limited access to technology, and the suboptimal utilization of local economic potential, remain obstacles to achieving sustainable village development. This article aims to develop a collaborative governance model as a strategy for strengthening the village innovation ecosystem through synergy among village governments, Village-Owned Enterprises (BUMDes), community groups, the private sector, higher education institutions, and local governments. The method used is a descriptive qualitative approach through literature study, observation of village institutions, and analysis of innovation-based village development models. The findings indicate that strengthening local institutions is a key factor in creating a sustainable innovation ecosystem. The proposed collaborative governance model consists of four main pillars: strengthening village institutions, developing an innovation-based economy, digitalizing village services and enterprises, and building multi-stakeholder partnerships. The implementation of this model is expected to enhance village adaptive capacity, strengthen local economic competitiveness, and support the achievement of the Village Sustainable Development Goals (Village SDGs) in Sidenreng Rappang Regency.

Keywords: Collaborative Governance; Local Institutions; Sidenreng Rappang Regency; Sustainable Development; Village Innovation Ecosystem.

Abstrak. Pembangunan desa berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan ekosistem inovasi yang mampu mendorong kemandirian desa. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi sumber daya pertanian, sosial, dan ekonomi yang besar untuk dikembangkan melalui inovasi berbasis lokal. Namun, berbagai tantangan seperti lemahnya kapasitas kelembagaan desa, rendahnya kolaborasi antaraktor, keterbatasan akses teknologi, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Artikel ini bertujuan mengembangkan model tata kelola kolaboratif (collaborative governance) sebagai strategi penguatan ekosistem inovasi desa melalui sinergi antara pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur, observasi kelembagaan desa, dan analisis model pengembangan desa berbasis inovasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lokal menjadi faktor utama dalam menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Model tata kelola kolaboratif yang diusulkan terdiri atas empat pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan desa, pengembangan ekonomi berbasis inovasi, digitalisasi layanan dan usaha desa, serta kemitraan multipihak. Implementasi model ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas adaptif desa, memperkuat daya saing ekonomi lokal, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kata Kunci: Collaborative Governance; Ekosistem Inovasi Desa; Kabupaten Sidenreng Rappang; Kelembagaan Lokal; Pembangunan Berkelanjutan.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa saat ini mengalami transformasi paradigma dari pendekatan yang berfokus pada pembangunan fisik menuju pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Pergeseran paradigma tersebut sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya pembangunan inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, desa dipandang sebagai pusat pertumbuhan baru yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik wilayah agraris dengan potensi unggulan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro berbasis masyarakat. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan inovasi desa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, berbagai desa di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kapasitas kelembagaan lokal, keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa.

Kelembagaan lokal merupakan instrumen penting dalam proses pembangunan desa karena berfungsi sebagai wadah koordinasi, pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan program pembangunan. Keberadaan lembaga desa seperti pemerintah desa, BUMDes, kelompok tani, kelompok perempuan, karang taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya menentukan keberhasilan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan lokal perlu diposisikan sebagai fondasi utama dalam membangun ekosistem inovasi desa.

Ekosistem inovasi desa merupakan suatu sistem yang menghubungkan berbagai aktor pembangunan dalam menghasilkan, mengadopsi, dan mengimplementasikan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, inovasi desa tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mencakup inovasi kelembagaan, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Keberhasilan inovasi desa sangat ditentukan oleh kemampuan berbagai aktor untuk berkolaborasi dalam suatu kerangka tata kelola yang efektif.

Konsep collaborative governance menawarkan pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Collaborative governance menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, pembangunan desa tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan hasil

kerja sama berbagai pihak yang memiliki sumber daya dan kepentingan yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan mengembangkan model tata kelola kolaboratif dalam penguatan kelembagaan lokal untuk mendukung pengembangan ekosistem inovasi desa yang berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. KAJIAN TEORITIS

Pembangunan desa berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara komprehensif oleh Brundtland Commission (1987) melalui laporan *Our Common Future*. Dalam konteks pembangunan desa, keberlanjutan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan lokal, dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya integrasi dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Holden et al., 2017).

Konsep ekosistem inovasi berkembang dari teori inovasi yang dikemukakan oleh Schumpeter (1934), yang menjelaskan bahwa inovasi merupakan motor utama pembangunan ekonomi melalui penciptaan kombinasi baru dalam proses produksi, organisasi, maupun pemasaran. Dalam konteks desa, ekosistem inovasi dipahami sebagai jaringan interaksi antara pemerintah desa, masyarakat, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi sosial yang secara bersama-sama menghasilkan, mengadopsi, dan menyebarluaskan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isenberg (2010) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu ekosistem inovasi sangat dipengaruhi oleh adanya kolaborasi antaraktor, akses terhadap sumber daya, kepemimpinan lokal, serta lingkungan kelembagaan yang mendukung tumbuhnya inovasi.

Penguatan kelembagaan lokal menjadi aspek fundamental dalam pembangunan desa karena kelembagaan berfungsi sebagai instrumen pengaturan, koordinasi, dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Menurut North (1990), kelembagaan merupakan seperangkat aturan formal dan informal yang membentuk perilaku individu dan organisasi dalam suatu sistem sosial. Dalam pembangunan desa, kelembagaan lokal meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, kelompok perempuan, serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Kelembagaan yang

kuat mampu meningkatkan kapasitas kolektif masyarakat dalam mengelola sumber daya, menyelesaikan konflik, dan mendorong inovasi pembangunan secara berkelanjutan.

Perspektif modal sosial (*social capital theory*) yang dikembangkan oleh Putnam (1993) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, norma sosial, dan jaringan kerja sama yang berkembang dalam masyarakat. Modal sosial yang kuat akan memperkuat kemampuan masyarakat dalam melakukan aksi kolektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks desa, keberadaan jaringan sosial yang solid dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, memperkuat kolaborasi antaraktor lokal, dan mempercepat penyebaran inovasi. Oleh karena itu, modal sosial menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan ekosistem inovasi desa yang berkelanjutan.

Pengembangan ekosistem inovasi desa juga dapat dijelaskan melalui teori difusi inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*) yang dikemukakan oleh Rogers (2003). Teori ini menjelaskan bahwa inovasi akan diadopsi oleh masyarakat melalui proses komunikasi dalam suatu sistem sosial selama periode tertentu. Tingkat keberhasilan adopsi inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi, saluran komunikasi, kondisi sosial masyarakat, dan peran agen perubahan. Dalam pembangunan desa, pemerintah desa, pendamping desa, akademisi, dan tokoh masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong adopsi inovasi dalam bidang ekonomi, pelayanan publik, maupun tata kelola kelembagaan.

Pendekatan *collaborative governance* menjadi salah satu teori yang relevan dalam menjelaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan desa. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam suatu forum bersama untuk mencapai konsensus dalam penyelesaian masalah publik. Teori ini menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, komitmen bersama, dan pembagian tanggung jawab dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks desa, tata kelola kolaboratif memungkinkan terjadinya sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun inovasi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengembangkan kerangka *Collaborative Governance Regime (CGR)* yang menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu keterlibatan prinsipil (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas untuk bertindak bersama (*capacity for joint action*). Ketiga elemen tersebut sangat relevan dalam pengembangan ekosistem inovasi desa karena pembangunan desa membutuhkan kesepahaman antaraktor, komitmen kolektif,

serta dukungan sumber daya yang memadai. Melalui tata kelola kolaboratif, berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor dapat diintegrasikan untuk menghasilkan solusi inovatif terhadap berbagai permasalahan pembangunan desa.

Dalam perspektif pembangunan desa modern, konsep Quadruple Helix yang dikembangkan oleh Carayannis dan Campbell (2009) juga memberikan landasan teoritis yang kuat dalam pengembangan ekosistem inovasi desa. Model ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses inovasi. Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, model tersebut dapat diterapkan melalui sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, perguruan tinggi, sektor swasta, kelompok masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi berbasis potensi lokal. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan desa, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta mendukung terwujud.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis pengembangan ekosistem inovasi desa melalui penguatan kelembagaan lokal dalam mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika hubungan antaraktor, proses kolaborasi, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan tata kelola pembangunan desa. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi peran kelembagaan lokal, pola interaksi antar pemangku kepentingan, dan model tata kelola kolaboratif yang berkembang dalam mendukung inovasi desa.

Lokasi penelitian dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki praktik inovasi desa dan aktivitas kelembagaan lokal yang relatif aktif. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa desa-desa tersebut memiliki potensi ekonomi lokal, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok masyarakat, serta program inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, pengelola BUMDes, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok tani, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran kelembagaan lokal, bentuk kolaborasi antaraktor, tantangan pengembangan inovasi desa, serta strategi pembangunan berkelanjutan yang diterapkan. Observasi lapangan digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas kelembagaan, program inovasi desa, dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen perencanaan desa, laporan BUMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta berbagai regulasi dan dokumen kebijakan yang relevan.

Untuk memperkuat validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan (credibility) dan keakuratan data penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, kategorisasi, dan penyederhanaan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, dan bagan hubungan antaraktor untuk memudahkan interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi secara berulang guna memastikan konsistensi temuan penelitian.

Kerangka analisis penelitian mengacu pada teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) serta kerangka Collaborative Governance Regime dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Analisis difokuskan pada aspek keterlibatan aktor (stakeholder engagement), motivasi bersama (shared motivation), kapasitas tindakan kolektif (capacity for joint action), serta dampaknya terhadap pengembangan ekosistem inovasi desa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif penguatan kelembagaan lokal dan pembangunan berkelanjutan untuk menjelaskan hubungan antara kapasitas kelembagaan, inovasi desa, dan keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini merumuskan Model Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Ekosistem Inovasi Desa yang menggambarkan hubungan sinergis antara pemerintah desa, BUMDes, masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi, dan

pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Model yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam memperkuat kelembagaan lokal dan meningkatkan efektivitas pembangunan berbasis inovasi.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi berbasis sumber daya lokal, terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro masyarakat. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan kelembagaan lokal seperti pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, kelompok perempuan, karang taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum berjalan optimal karena kapasitas kelembagaan yang masih beragam antar desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa dan pengelola BUMDes, ditemukan bahwa sebagian besar kelembagaan desa masih berorientasi pada pelaksanaan program administratif dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai agen inovasi. Kegiatan kelembagaan cenderung bersifat rutin dan belum terintegrasi dengan strategi pengembangan ekonomi desa berbasis inovasi. Kondisi ini menyebabkan berbagai program pengembangan desa belum mampu menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Penelitian juga menemukan bahwa keberadaan BUMDes memiliki peran strategis dalam mendukung inovasi desa. Beberapa BUMDes telah mengembangkan unit usaha berbasis potensi lokal seperti pengelolaan hasil pertanian, perdagangan pupuk, jasa penyewaan alat pertanian, dan pemasaran produk UMKM. Akan tetapi, keterbatasan kapasitas manajerial, akses pasar, dan pemanfaatan teknologi digital masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha desa yang berkelanjutan.

Dari aspek partisipasi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan kegiatan pembangunan. Namun, partisipasi tersebut masih didominasi oleh kelompok tertentu sehingga belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi yang inklusif. Kelompok pemuda dan perempuan masih memiliki keterlibatan yang relatif terbatas dalam proses pengambilan keputusan terkait inovasi dan pembangunan desa.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian desa telah mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan promosi produk desa. Penggunaan media sosial untuk pemasaran produk UMKM dan penyebaran informasi desa menjadi salah satu bentuk inovasi yang berkembang. Namun, keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya

literasi teknologi masyarakat masih menjadi kendala dalam proses transformasi digital desa.

Penelitian juga menemukan bahwa hubungan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta belum terbangun secara sistematis. Kerja sama yang dilakukan masih bersifat insidental dan bergantung pada program tertentu. Akibatnya, proses transfer pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mendukung inovasi desa belum berjalan secara optimal.

Meskipun demikian, terdapat komitmen yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa desa telah menginisiasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan desa, dan digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem inovasi desa di Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan penguatan kelembagaan lokal yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan pola kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kelembagaan yang kuat dan kolaboratif menjadi prasyarat penting dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak pada pembangunan desa.

Tabel 1. Temuan Utama Pengembangan Ekosistem Inovasi Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Aspek	Kondisi Saat Ini	Tantangan	Strategi Penguatan
Kelembagaan Desa	Berfungsi secara administratif	Kapasitas manajerial rendah	Pelatihan dan pendampingan kelembagaan
BUMDes	Memiliki unit usaha produktif	Keterbatasan inovasi bisnis	Penguatan tata kelola dan digitalisasi usaha
Partisipasi Masyarakat	Terlibat dalam musyawarah desa	Belum inklusif	Peningkatan partisipasi kelompok perempuan dan pemuda
Digitalisasi Desa	Mulai berkembang	Infrastruktur dan literasi digital rendah	Pengembangan Smart Village
Kolaborasi Antaraktor	Bersifat insidental	Belum terintegrasi	Pembentukan forum kolaboratif desa
Inovasi Ekonomi Lokal	Berbasis potensi lokal	Nilai tambah produk rendah	Hilirisasi dan pemasaran digital
SDM Desa	Memiliki potensi tinggi	Kompetensi inovasi terbatas	Pengembangan kapasitas berkelanjutan
Pembangunan Berkelanjutan	Sudah menjadi agenda desa	Implementasi belum optimal	Integrasi SDGs Desa dalam perencanaan

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan ekosistem inovasi desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lokal. Hasil ini sejalan dengan teori kelembagaan yang dikemukakan North (1990) yang menjelaskan bahwa institusi merupakan

seperangkat aturan dan organisasi yang menentukan efektivitas tindakan kolektif dalam pembangunan. Kelembagaan desa yang memiliki kapasitas manajerial dan kepemimpinan yang kuat cenderung lebih mampu menciptakan inovasi dan mengelola sumber daya secara efektif dibandingkan kelembagaan yang masih berorientasi administratif.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, keberadaan kelembagaan lokal yang kuat menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan desa. Holden et al. (2017) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penguatan kapasitas institusional yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa desa-desa yang memiliki kelembagaan aktif cenderung lebih responsif dalam mengembangkan program inovasi berbasis kebutuhan masyarakat.

Peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa juga menunjukkan relevansi dengan teori pembangunan ekonomi lokal. BUMDes berfungsi sebagai instrumen yang mampu mengintegrasikan sumber daya ekonomi desa dengan kebutuhan pasar. Namun, keterbatasan kapasitas manajerial dan inovasi bisnis menyebabkan sebagian BUMDes belum mampu berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kewirausahaan dan tata kelola menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat daya saing ekonomi desa.

Partisipasi masyarakat yang ditemukan dalam penelitian memperlihatkan pentingnya modal sosial dalam pembangunan desa. Temuan ini mendukung teori Putnam (1993) yang menyatakan bahwa kepercayaan, norma sosial, dan jaringan kerja sama merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi mampu memperkuat legitimasi kebijakan desa sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi program inovasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses adopsi inovasi di desa berlangsung secara bertahap melalui interaksi sosial antaraktor pembangunan. Temuan ini sesuai dengan teori Difusi Inovasi Rogers (2003) yang menjelaskan bahwa keberhasilan inovasi dipengaruhi oleh komunikasi, karakteristik inovasi, dan peran agen perubahan. Pemerintah desa, pendamping desa, dan tokoh masyarakat memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mempercepat penyebaran inovasi di tingkat lokal.

Dari perspektif collaborative governance, keterbatasan koordinasi antaraktor yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi masih memerlukan penguatan kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, komitmen bersama, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam

proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, forum kolaborasi desa perlu dibangun secara lebih sistematis untuk memperkuat sinergi antaraktor.

Temuan mengenai transformasi digital desa juga menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi instrumen penting dalam mendukung inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperluas akses pasar bagi produk-produk unggulan desa. Kondisi ini sejalan dengan konsep inovasi modern yang menempatkan teknologi sebagai faktor utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini merumuskan Model Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Ekosistem Inovasi Desa yang menempatkan pemerintah desa, BUMDes, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta, dan pemerintah daerah sebagai aktor utama pembangunan. Model ini mengadopsi pendekatan Quadruple Helix yang menekankan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan inovasi. Melalui model tersebut, penguatan kelembagaan lokal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi pembangunan, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi ekonomi, sosial, dan kelembagaan menuju pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem inovasi desa di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola sumber daya, membangun partisipasi masyarakat, dan mendorong inovasi pembangunan. Kelembagaan desa yang terdiri atas pemerintah desa, BUMDes, kelompok masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pembangunan desa. Namun demikian, masih ditemukan berbagai tantangan seperti keterbatasan kapasitas manajerial, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan yang menghambat pengembangan inovasi desa secara berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan pendekatan collaborative governance mampu menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat ekosistem inovasi desa. Melalui sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, BUMDes, dan masyarakat, berbagai sumber daya yang tersedia dapat diintegrasikan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, digitalisasi desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kolaborasi yang didasarkan pada kepercayaan, komitmen bersama, dan partisipasi aktif seluruh aktor pembangunan terbukti mampu meningkatkan kapasitas adaptif desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Berdasarkan temuan penelitian, model tata kelola kolaboratif yang dibangun melalui penguatan kelembagaan lokal, pengembangan ekonomi berbasis inovasi, transformasi digital desa, dan kemitraan multipihak dapat menjadi alternatif model pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Model ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi desa, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan jejaring kolaborasi perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan desa guna menciptakan desa yang mandiri, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmad, J., & Erfina, E. (2026). Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang: Pendekatan Model George C. Edward III. *JDP: Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 9(01), 846–864.
- Ahmad, J., Nonci, N., Zainuddin, A. M., Astuti, Y., & Gafur, A. (2026). Digitalization of Police Services as Public Service Innovation: A Case Study of the Parepare Police. *Journal of Local Government Issues*, 9(1).
- Aksan, M., Rahmat, M. R., Hardianti, H., Sundari, S., Mursalat, A., Irwan, M., et al. (2026). *Smart Village: Sinergi Desa dalam Pertanian, Teknologi, dan Kewirausahaan*. CV Eureka Media Aksara.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Astuti, Y., Pribadi, U., Ahmad, J., & Purwaningsih, T. (2026). Understanding Urban–Rural Disparities in Digital Government Maturity: A Governance Perspective. *Frontiers in Political Science*, 8, 1779611.
- Brundtland Commission. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). Mode 3 and Quadruple Helix: Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3–4), 201–234.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dahlia, D., Mustanir, A., Syarifuddin, H., Razak, M. R. R., & Mustapa, R. (2026). Penerapan Model Rais-MR3 dalam Tata Kelola Keuangan Desa di Desa Sipodeceng. *JDP: Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 9(01), 663–674.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Ernawati, E., Nonci, N., Yasin, A., Razak, M. R. R., & Khaerunnisa, M. (2026). Peranan Aparatur Pemerintahan dalam Pelayanan Publik: Studi Penggunaan Aplikasi SIBERAS di Desa Sipodeceng. *JDP: Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 9(01), 474–491.

- Holden, E., Linnerud, K., & Banister, D. (2017). The Imperatives of Sustainable Development. *Sustainable Development*, 25(3), 213–226.
- Husen, L. H., Ahmad, J., & Mustanir, A. (2026). Analisis Pengaruh Mutu Layanan terhadap Kepuasan Pemohon SKCK di Polres Sidrap. *JDP: Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 9(01), 722–732.
- Isenberg, D. J. (2010). How to Start an Entrepreneurial Revolution. *Harvard Business Review*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *SDGs Desa dan Implementasinya dalam Pembangunan Desa*. Kemendes PDTT.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyadi, A., Ahmad, J., Razak, M. R. R., Lubis, S., & Astuti, Y. (2026). Implementasi Smart Village dalam Mitigasi Bencana: Perspektif Kebijakan dan Tata Kelola Berbasis Regulasi di Kota Parepare. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(3), 824–836.
- Mustanir, A. (2026). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang: Studi pada Kecamatan Kulo. *JDP: Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 9(01), 921–929.
- Mustanir, A., Sellang, K., Uceng, A., Haeruddin, H., & Hasim, N. (2026). Mapping the Knowledge Structure of Human and Social Sustainability: A Bibliometric and Network Analysis. *SSRN Electronic Journal*.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahayu, A., Nonci, N., Erfina, E., Ahmad, J., & Nilwana, A. (2026). Efektivitas Penggunaan Teknologi Informatika dalam Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. *JDP: Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 9(01), 255–268.
- Razak, M. R. R., B, S., Sofyan, W., Lubis, S., Ahmad, J., & Karunia, R. L. (2026). Bridging Global Evidence and Local Realities: The Rais-MR3 Digital Governance Model for Transforming Village Fund Management. *Frontiers in Sustainability*, 7, 1811625.
- Razak, M. R. R., Sofyan, S., Ahmad, J., Mustanir, A., Mustapa, R., & Rustan, R. (2026). Peningkatan Aksesibilitas Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas melalui Adaptasi Best Practice di Singapura. *JPMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 6(1), 91–99.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rukmini, R., Razak, M. R. R., Lubis, S., Astuti, Y., & Khaerunnisa, M. (2026). Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Desa Sipodeceng. *JDP: Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 9(01), 626–642.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press.
- Sundari, S., Ahmad, J., Mustanir, A., Muliani, M., Razak, M. R. R., Jumiati, J., Said, S., et al. (2026). *Governansi Digital dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Transformasi*. CV

Eureka Media Aksara.

Yasmin, M., Hamid, H., Mustanir, A., Said, S., Yakub, R., Syamsunir, S., et al. (2025). Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Pengembangan DesCafe Berbasis Potensi Lokal di Desa Lise. *GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(3), 2393–2408.